



Pendidikan Politik: Konsep Nilai Etika Universal Perspektif Kohlberg Dan Islam

Abstrak

The emerge of unlimited, transparency, globally type of new media creates a lot of dynamics. It plays important role in the socialization process of political well as being a government media that accumulate some aspiration and provide the peoples. In addition, the unlimited media has been used several group carry out political hegemony that bringout conflict among sympathizer. With the result that obscure the purpuse of politic to achieve global public goodness. So that, moral re-formulation in politics are required an alternative way to cultivate the right of moral education. One of them is the revolutionary concept of Kohlberg about the importance of moral universal in the character. Islam have also universal ethics which is the subject matter as its mission as a religion of mercy for the universe. Ethics is in line with the universal values of humanity, equality, justice and human rights. And then eventually, the formation of inclusive characters will affects moral in politics.

Munculnya jenis media baru yang tidak terbatas, transparan, global dan bebas menimbulkan banyak dinamika. Ia berperan penting dalam proses sosialisasi politik sekaligus menjadi media pemerintah dalam mengumpulkan aspirasi dan layanan bagi masyarakat. Selain itu ketidakterbatasan media tersebut telah digunakan kelompok lain dalam melakukan hegemoni politik yang pada akhirnya memunculkan konflik pada kalangan simpatisannya sehingga mengaburkan tujuan berpolitik untuk meraih kebaikan bersama. Untuk itu perumusan kembali moral berpolitik memerlukan jalan alternatif dalam membudayakan pendidikan moral yang tepat. Salah satunya ialah dengan konsep revolusioner Kohlberg tentang pentingnya moral universal dalam karakter. Dalam islam terdapat nilai etika universal yang menjadi pokok ajaran sebagaimana misinya bahwa agama pembawa rahmat bagi alam semesta. Etika itu bersesuaian dengan nilai-nilai universal kemanusiaan, kesetaraan, keadilan dan hak asasi manusia. Pada akhirnya terbentuknya karakter inklusif tersebut akan mempengaruhi moral dalam berpolitik.

Kata Kunci: Etika-Moral Universal, Pendidikan Politik, Islam

Oleh:

Muhammad Hasan Suryawan

*Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
hasansuryawan@gmail.com*

Pendahuluan

Dinamika kehidupan berdemokrasi masyarakat Indonesia telah memasuki babak baru yang semakin dinamis. Dimulai dari sejak demokrasi berkibar pada era reformasi sampai pada era milenial yang ditandai oleh kemajuan dibidang teknologi informasi. Tentu proses pendewasaan politik yang disebut oleh Hungtinton dan Dominguez dengan istilah Pembangunan Politik ini terus berdinamika sampai sekarang.

Transformasi komunikasi yang pesat ini juga memunculkan media-media baru yang dapat membuat perubahan yang signifikan dalam kehidupan berdemokrasi. Masyarakat dapat langsung beraspirasi kepada pemimpin mereka misalnya melalui akun media sosial para pejabat publik, kepala daerah dan kepala negara. Tak sampai disana, pemerintah daerah juga dapat menggunakan layanan berbasis *website* dalam memberikan pelayanan publik seperti yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta (www.jakarta.go.id) yang kemudian banyak diikuti daerah lainnya.

Inilah perbedaan antara media konvensional di masa sebelum reformasi dengan media baru pasca reformasi. Karakteristik media baru seperti yang dirangkum dari Sparks (2001), Pavlik (1996) mengandung isi yang tidak terbatas, transparan, global dan bebas. Dibandingkan dengan media konvensional yang terbatas dengan banyaknya sensor. Dari segi aspek ke publik media baru lebih luas, interaktif, multi-arah, kebebasan dan kesetaraan (*equality*). Sedangkan media konvensional cenderung memiliki tingkat akses yang rendah dan satu arah,¹ sehingga media

baru berpotensi tidak memiliki batasan-batasan yang jelas baik dari segi normatif maupun etika-moral.

Dalam proses berdemokrasi saat ini kebebasan dilakukan tanpa dibangun oleh nilai-nilai budaya (*civic value*). Ini kemudian menimbulkan permasalahan baru. Konflik anarki yang dulu pernah terjadi pada era sebelum reformasi rupanya masih terjadi walaupun konflik tersebut telah bermetamorfosa menjadi bentuk lain. Bentuk konflik- fisik anarkis yang pernah terjadi berubah menjadi konflik-verbalis antar golongan elit politik yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik fisik sampai pada perpecahan. Seperti fenomena anarkisme verbalis yang terjadi saat ini di media sosial adalah banyaknya *hoax* (berita bohong) yang beredar, kampanye hitam (*black campaign*), membangkitkan sentimen agama, serta perilaku tidak terpuji lainnya seperti saling menghujat, memfitnah, mengadu-domba dan lainnya.

Bahkan adanya pemilu sebagai bentuk representasi dari demokrasi yang sehat pun kemudian melahirkan perspektif sebagai sebuah perang yang akan melahirkan pemenang dan pecundang. Pemahaman semacam ini bersifat sangat "distributif" yang menjadikan pemilu hanya dipandang sebagai sebuah kompetisi 'menang-kalah'. Tujuan dan kepentingan bernegara dilupakan yaitu mewujudkan cita-cita bersama oleh gerakan-gerakan perjuangan menuju kekuasaan (*struggle for power*) yang kemudian memunculkan kembali isu primordialisme, seperti nasionalisme etnis, komunalisme, dan sektarianisme keagamaan, yang pada akhirnya dapat mengancam demokrasi.

Berdasar hal tersebut maka penulis memiliki dua alasan dalam penulisan artikel ini; *Pertama*, para elite politik telah melupakan tujuan luhur dalam ber-

1 Salvatore Simarmata, *Media Baru, Ruang Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia*, (Prodi Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya Jakarta, Vol. 3 No. 2 November 2014), hlm. 22.

demokrasi. Anomali demokrasi dan wacana politik saat ini nyatanya lebih mementingkan kepentingan golongan dan ideologi mereka masing-masing. Padahal Nurcholish Madjid (1999) menyatakan, "*Sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem politik yang tidak hanya baik untuk kelompok, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia*".

Kedua, merekonstruksi nilai etika budaya universal yang dulu pernah menyatukan bangsa Indonesia dari keterpecahan menjadi negara kesatuan. Di dalam media sosial atau media masa, kita diperlihatkan debat tak mendidik bahkan sampai pada hujatan-hujatan para politisi. Mereka kemudian mempertontonkan cara-cara berfikir subjektif, sempit tanpa adanya konfirmasi data-data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Mereka juga menjadi 'teladan' buruk kepada masyarakat sehingga menimbulkan gesekan horizontal pada kalangan bawah.

Untuk mereduksi segala macam dinamika politik yang tidak sehat itu maka perlu kiranya merekonstruksi nilai-nilai budaya yang mengedepankan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satunya dengan memberikan bekal pendidikan politik atau juga dikenal dengan istilah sosialisasi politik (*political socialization*) kepada masyarakat maupun generasi muda.

Penanaman sikap baik dalam berpolitik ini tak lepas dari adanya intervensi pendidikan moral. Kaitannya dengan isu politik disini, pendidikan moralitas dapat memberikan efek secara langsung dengan pendidikan politik ialah dengan pemahaman nilai-nilai etika universal manusia. Salah satunya ialah teori perkembangan kognisi moral Lawrence Kohlberg. Konsep ini setidaknya mengakomodir keragaman geografis dan sosial budaya yang

kemudian disimpulkan pada satu titik yang sama, yakni nilai-nilai moralitas universal yang diakui oleh semua kalangan.

Landasan Karakter:

Antara Hukum Dan Moralitas

Perlu untuk ditinjau kembali keterkaitan hukum dan moralitas sebagai landasan seseorang dalam bersikap atau bertindak. Apakah setiap orang membatasi tindakannya hanya pada aspek-aspek aturan/hukum? Terlepas apakah perbuatannya tersebut bermoral atau tidak. Ataukah tindakan itu dilandasi oleh nilai-nilai moralitas yang manusiawi?. Terlepas apakah tindakan itu bertentangan atau tidak secara hukum.

Disatu sisi, kurang tepat jika pemisahan antara moralitas dan hukum diinterpretasikan secara berlebihan. Sebab dalam sistem hukum selalu mengandung kaidah-kaidah fundamental yang melandasinya, yang kita sebut sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum ini selalu memuat ukuran-ukuran nilai (*waarde maatstaven*) yang berakar pada nilai-nilai tertentu.² Salah satunya ialah nilai-nilai moral kemanusiaan. Namun, moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum.³ Dengan demikian akan ada banyak nilai-nilai etika yang tidak menjadi aturan/hukum secara legal. Yang diperlukan kemudian ialah membangun budaya yang bermoral.

Menurut M.H Ainun Najib atau Cak Nun bisa menjadi bahan renungan kita bahwa diatas hukum itu terdapat moralitas. Banyak perilaku manusia yang tidak

2 Suadamara Ananda, *Hukum dan Moralitas*, (Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24. No. 3 Juli 2006), hlm. 305.

3 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni...*dalam Fitrah Hamdani. *Paradigma Profetik: Antara Konsep Moralitas Piagam Madina Dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A Hart*, (Jurisprudence, Vol. 6 No.1 Maret 2016), hlm. 63.

sesuai dengan moralitas walaupun itu tidak bertentangan secara hukum. Misalnya acuh atau tidak peduli terhadap tetangga yang kelaparan memang secara hukum tidak dapat disalahkan. Namun, secara moralitas kemanusiaan ia 'bersalah' (perbuatan buruk) yang telah membiarkan seseorang kelaparan. Atau bentuk lainnya seperti kegiatan memprovokasi isu-isu sensitif yang akhirnya menyebabkan komunikasi politik tidak sehat; saling memfitnah, penyebaran berita *hoax* dan politik tidak santun.

Maka dari itu, makna pendidikan politik atau *political socialization* bukan hanya sebatas sosialisasi sistem perpolitikan atau memahami aturan main dalam berdemokrasi. Akan tetapi, pemahaman semacam ini nyatanya tidak dapat meredam konflik sosial yang terjadi antar individu dan golongan di media sosial. Oleh karenanya diskursus etika dalam pembangunan politik yang sehat sangat diperlukan.

Ruang lingkup etika politik sebenarnya sangat luas, antara lain membahas tentang kelangsungan sistem perpolitikan yang baik dan sehat tanpa adanya rezim otoriter yang melahirkan korupsi, kolusi dan lain sebagainya. Lebih luas lagi etika politik juga dalam dimensi mengenai aturan perpolitikan yang jauh ideologi primordialisme seperti isu etnis kesukuan, sektarianisme agama dan komunalisme.

Sinergitas antara hukum dan moralitas harus berjalan beriringan dalam membangun budaya politik yang baik. Pembangunan budaya politik itu harus dimulai dari objek politiknya. Menurut Almond dan Verba (1963) yang dikutip Aos Kusnandi, bahwa di dalam objek politik harus mencakup tiga komponen, yaitu kognitif, afektif dan evaluatif. Pada aspek kognitif seseorang akan dituntut untuk memahami sistem politik yang baik dan benar.

Selanjutnya mereka tentu akan bersikap, atau disebut juga dengan tahapan afektif. Kemudian harus ada peninjauan kembali apakah dalam pemahaman dan aktualisasi politik itu sesuai dengan norma, moral dan etika politik yang sudah di sepakati, atau ini disebut sebagai tahap evaluatif.

Oleh karena itu, membangun nilai etika berpolitik dapat menyempurnakan peran hukum di dalam pembentukan budaya moral. Usaha itu dapat dimulai melalui aspek pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan politik yang menjunjung tinggi inklusitas sangat penting mengingat Indonesia sendiri terbangun dari sosial-budaya yang multidimensi baik secara sosial budaya kultur dan agama.

Pemikiran Moral Kohlberg: Konstruksi Nilai-Nilai Etika Universal

Peristiwa *Holocaust* telah mengingatkan kita betapa kejamnya kekuasaan Nazi atas kaum Yahudi. Pada saat itu juga terjadi blokade Britania raya terhadap kaum Yahudi yang ingin mengungsi keluar Eropa. Pertanyaan mendasarnya dalam benak Kohlberg yang kala itu seorang tentara sekutu yang tergabung dalam aksi blokade, yaitu apakah dengan membangun negara Yahudi lebih bermoral atau lebih sesuai dengan tujuan yang lebih tinggi daripada mematuhi hukum (komando dalam membelokade kaum Yahudi)?⁴ Kebimbangannya itu terjawab ketika ia kemudian menyelundupkan orang-orang Yahudi dari Eropa ke Palestina dengan menggunakan kapal S.S Redemption. Kohlberg lebih memilih mengikuti nilai kemanusiaan yang ada di dalam dirinya daripada mentaati hukum (aturan) negaranya.

4 Larry P. Nucci dan Darcia Narvaez, *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter*, Terj. Imam Baehaqie dan Derta Sri Widowatie, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2014), hlm. 76.

Menurut Kohlberg, moralitas pada dasarnya mengalami perkembangan dan berpusat pada ranah kognitif, bersifat interaksional dan dilandasi oleh prinsip-prinsip keterbukaan, kesamaan, resiprositas, dan keadilan. Moral bagi Kohlberg dibatasi oleh satu konstruk lain yang disebut pertimbangan (*judgment*), terutama karakter formal dari pertimbangan dan bukan isinya.⁵

Pemikiran perkembangan moral Kohlberg sangat dipengaruhi oleh pemikiran Jean Piaget yang memiliki premis semua pengetahuan dibangun. Namun Kohlberg kemudian menekankan interaksi sosial dalam membangun pikiran itu. Tentu pola interaksi sosial tersebut merupakan karya Durkheim, namun dalam beberapa literatur juga disebutkan Kohlberg juga dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber.

Model Kohlberg tentang tahapan perkembangan moral ini menggambarkan potensi evolusi penalaran moral menuju kompleksitas dan kematangan yang lebih besar, yang tak hanya berupa cita-cita moral, jenis-jenis ideal atau model-model yang hanya berupa penalaran namun juga merupakan tahapan kognitif-perkembangan nyata dalam struktur moral-sosial yang berkembang.⁶ Adapun tahapan moral yang dirumuskan oleh Kohlberg terdiri atas enam tahapan; (1) Orientasi ketaatan dan hukuman, (2) Tujuan dan pertukaran instrumental, (3) Harapan timbal balik antarpribadi, hubungan baik, (4) Pemeliharaan sistem sosial dan kesadaran, (5) Hak-hak dasar dan kontrak sosial, (6) Prinsip etika Universal.

Keenam tahapan ini dapat di kategorikan menjadi; (1) Tingkat pre-konvensional (tahapan 1 dan 2), yang sangat berorientasi

si pada ketaatan terhadap hukum dengan konsekuensi benar atau salah, mendapat ganjaran atau hukuman, dan semacamnya. (2) Tingkat konvensional atau kebiasaan (tahapan 3 dan 4), yang manaseorang manusia telah memiliki motivasi akan eksistensinya ditengah masyarakat. Sikap dan perilakunya akan senantiasa menyesuaikan diri dengan kondisi dan citra stereotipe mayoritas masyarakat. (3) Tingkatan post-konvensional atau post kebiasaan (tahapan 5 dan 6), yang mana seseorang telah memberikan penafsiran sendiri akan esensi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang sah secara universal yang menyangkut seluruh manusia dan tidak terikat lagi bagaimana otoritas atau budaya masyarakat. Juga dapat diartikan sebagai moral yang berorientasi pada keputusan hati-nurani berdasarkan prinsip-prinsip etika pilihan sendiri, secara rasional, dan komprehensif.

Dalam berpolitik tentu akan memunculkan banyak interaksi antar kelompok partai politik. maka dari itu diperlukam adanya sikap koperatif dengan kolaboratif demi kemaslahatan bersama. membangun sikap kooperatif dimulai dengan penanaman nilai-nilai etika universal seperti saling menghargai, inklusif, dan toleransi.

Disinilah pentingnya ide Kohlberg yang menekankan pembangunan lingkungan moral harus menekankan rasa komunitas, nilai-nilai demokrasi, otonomi pribadi, hak-hak dan tanggung jawab kolektif. Dalam penjelasan lebih terperinci mengenai hal ini adalah Kohlberg menghendaki adanya dilema moral *enkulturasi*⁷, yang isinya akan dipikirkan kembali, mengikuti tahap demi tahap urutan perkembangan moral yang semakin kompleks.⁸ Lingkungan yang baik dapat

5 Sarbini, *Model pembelajaran kognitif moral: dari teori ke aplikasi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 13.

6 Larry P. Nucci dan Darcia Narvaez, *Op.Cit.*, hlm. 84.

7 *Enkulturas* yaitu Pewarisan budaya dari masa ke masa, atau orang tua kepada generasi berikutnya.

8 Larry P. Nucci dan Darcia Narvaez, *Op.Cit.*,

digunakan untuk membentuk dan membangun karakter moral yang baik. Adanya rasa demokrasi, keadilan dan kesetaraan merupakan instrumen-instrumen penting dalam pembentukan komunitas yang adil secara universal.

Kohlberg berharap bisa mengintegrasikan sosialisasi dengan perkembangan dengan cara memberikan prioritas kekuasaan pada komunitas namun juga melindungi hak-hak individu anggota komunitas.⁹ Penting untuk difahami bahwa perkembangan moral yang dimaksud Kohlberg tak hanya perkembangan moral secara kognitif, namun juga perkembangan-sosialisasi. Gagasan tersebut menegaskan bahwa jurang pemisah (*gap*) antara teori dan praktik harus diminimalisir.

Teladan Moral

Kohlberg percaya bahwa moralitas tanpa perbuatan adalah mayat. Maka semua teladan moral tersebut dijadikan sebagai "pendidik moral". Ia secara eksplisit mencatat bahwa presentasi tinggi dari teladan yang disebutnya adalah orang-orang dengan komitmen iman yang aktif dan bahwa etika mereka sering bersandar pada perspektif agama atau metafisika tentang kondisi manusia.¹⁰ Dalam kondisi ini seseorang telah berada pada posisi moral universal yang telah didasarkan atas esensi manusia itu sendiri.

Pendidik moral yang berpengalaman tahu bahwa penyampaian gambaran tahap-tahap moral mempunyai relevansi baru ketika diilustrasikan dengan contoh-contoh "yang diambil dari berita utama" atau ketika para teladan kedewasaan moral melakukan kunjungan tamu ke sesi kelas untuk berbicara mengapa ia pe-

duli.¹¹ Kegiatan ini setidaknya akan memberikan visualisasi di dalam pikiran akan sebuah aksi moral yang telah dilakukan. Memang melaksanakan moral memerlukan pembiasaan dan melalui proses yang sulit. Namun dengan adanya tokoh-tokoh teladan ini setidaknya memberikan gambaran bahwa moralitas yang hendak dibangun bukan hanya sekedar ide-ide atau sebatas penalaran namun juga merupakan fakta dan realitas.

Diskusi Dilema

Meta-analisis menonjol Schlaefli, Rest dan Thoma (1985) atas 55 studi menunjukkan bahwa pendekatan diskusi dilema menghasilkan efek pendidikan moderat dan signifikan terhadap perkembangan moral sedangkan jenis lainnya seperti program intervensi menghasilkan efek yang lebih kecil dan pengajaran akademik individu tentang humaniora menghasilkan efek yang bahkan lebih lemah.¹² Ini menunjukkan bahwa seseorang harus dipaparkan tentang realitas permasalahan yang sebenarnya, setelah itu ia kemudian akan memberikan telaah terhadap fenomena itu. Setiap dilema moral pasti memberikan dampak atau akibat yang merugikan bagi kehidupan, sehingga dalam pembelajaran moral, seseorang harus memikirkan solusi terbaik dari permasalahan itu. Solusi tersebut bukan hanya sebatas pada penyelesaian namun juga pencegahannya.

Pemahaman terhadap teori Kohlberg tentang pertimbangan moral ini mengimplikasikan strategi mengajar yang khusus untuk menstimulasi perkembangan moral. Diskusi dari dilema moral akan memberikan anggota kelompok memiliki kesempatan-kesempatan berikut:

hlm. 95.

9 *Ibid.*, hlm. 96.

10 *Ibid.*, hlm. 98.

11 *Ibid.*, hlm. 100.

12 *Ibid.*, hlm. 101.

1. Mempertimbangkan problema-problema moral sesungguhnya.
2. Mengalami konflik-konflik kognitif dan sosial sesungguhnya selama diskusi problema moral
3. Mengaplikasikan tingkat berpikir tertentu mereka terhadap situasi-situasi problematis.
4. Terbuka terhadap tingkat berpikir berikutnya yang lebih tinggi.
5. Menghadapkan ketidakkonsistenan pertimbangan mereka sendiri terhadap berbagai isu-isu moral tanpa seseorang yang menekankan pada jawaban benar atau salah.¹³

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Dilema moral adalah metode yang berguna bagi perkembangan moral, (2) Dalam kehidupan nyata, mungkin yang diambil dari pengalaman pribadi, lebih manjur bagi perkembangan moral daripada dilema hipotesis, (3) Ada zona perkembangan terdekat yang mana diskusi dilema memajukan perkembangan moral secara maksimal, (4) Rekan sebaya adalah guru atau mitra percakapan terbaik.¹⁴

Komunitas Adil

Kohlberg mendirikan "sekolah komunitas adil" pada tahun 1974 dengan tujuan untuk mengembangkan teori perkembangan moralnya. Menurutnya anggota kelompok harus melakukan interaksi sosial langsung untuk memaksimalkan perkembangan kognitif moralnya. Maka ia ingin lebih mengembangkan pembelajaran dilema moral yang telah dilakukannya.

Salah satu sekolah dengan konsep sekolah komunitas adil yang menjadi bagian dari sumbangsih Kohlberg adalah sekolah Cluster yang dijalankan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. Sekolah akan dikelola dengan demokrasi langsung. Semua masalah akan dibahas langsung dalam pertemuan komunitas mingguan yang mana semua anggota (siswa dan guru) memiliki suara.
2. Disamping itu, akan ada sejumlah komite yang akan diisi oleh siswa, guru dan orang tua.
3. Akan dibuat perjanjian sosial antara anggota-anggota yang akan menentukan hak dan tanggung jawab masing-masing orang.
4. Siswa dan guru memiliki hak dasar yang sama, termasuk mengemukakan kebebasan berpendapat, menghormati orang lain, dan kebebasan dari bahaya fisik atau penghinaan.¹⁵

Sekolah ini dikonsepsi sesuai dengan instrumen pembelajaran moral yang telah dijabarkan sebelumnya yaitu mengenai pentingnya keadilan sosial yang direalisasikan melalui sistem yang demokratis. Model pendidikan moral komunitas adil ini adalah memperluas teori Kohlberg dari penalaran moral individu ke budaya moral masyarakat.¹⁶ Sosialisasi semacam ini sekaligus akan mengajarkan siswa tentang pendidikan politik baik yang mana menunjukkan sikap saling menghargai, toleransi dan demokratis sangat penting dilakukan.

Selanjutnya beberapa aturan dibuat dalam prinsip-prinsip di atas bukan dalam rangka membuat sebuah otoritas atau peraturan ketat dalam mengikat pengetahuan moral ideal di dalam pikiran,

¹³ Sarbini, *Op.Cit.*, hlm. 30.

¹⁴ Larry P. Nucci dan Darcia Narvaez, *Op.Cit.*, hlm. 103.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

namun lebih bertujuan untuk mengatur jalannya sistem agar tujuan moral (baik dari segi otonom maupun heteronom) yang hendak dicapai dapat terpenuhi.

Keyakinan dalam penerapan per-Keyakinan dalam penerapan perkembangan moral Kohlberg memperhatikan beberapa hal, (1) Validasi tahap, bahwa tahap moralitas seseorang berbeda antara satu dan lainnya. (2) Universalitas budaya, empat tahapan pertama dalam teori perkembangan Kohlberg ditemukan hampir pada semua lintas budaya. (3) Dapat diterapkannya tindakan moral, nyatanya perilaku moral dan penalaran moral terkait secara positif dan signifikan. (4) Kemencakupan gender, bahwa baik laki-laki maupun perempuan menggunakan etika keadilan Kohlberg. (5) Kepedulian tidak lebih rendah dari keadilan, bahwa kepedulian berbeda dengan keadilan. Menciptakan keadilan melalui bias tertentu yang berbeda dari sikap kepedulian. Sehingga secara kultural konsep Kohlberg dapat membentuk moral kognitif melalui interaksi sosial melalui tahapan-tahapan moralnya.

Nilai-Nilai Inklusifitas Dalam Islam

Nilai yang ada di dalam islam sendiri sudah mengakomodir keseluruhan nilai-nilai moral universal yang banyak membicarakan persamaan hak dan toleransi dengan sesuatu yang berbeda diluar diri kita. Hal itu dalam rangka merespon sikap eksklusivitas keberagamaan yang sering dijadikan isu politis. Maka perlu adanya penguatan basis-basis inklusifisme dalam menciptakan islam yang benar-benar rahmat bagi alam semesta.

Secara umum, pemahaman tentang keberagaman seseorang terdiri atas dua tipe; Pertama Eksklusivistik yang dibangun oleh proses pembelajaran yang literal dan dilakukan dengan mekanisme

formalistik-radikal yang sifatnya *rigid* (kaku). Tipe kedua ialah Inklusivistik yang dibangun oleh proses pembelajaran yang dialogis dan dilakukan dengan pendekatan substansial-inklusivistik yang sifatnya lebih terbuka. Hal itu dapat diwujudkan melalui upaya pembelajaran yang dialogis sehingga dapat memacu kreatifitas nalar mereka di dalam melihat kehidupan dalam konteks keberagaman.

Urgensi mengintegrasikan kembali inklusivitas ajaran Islam (yang merupakan substansi dari ajaran Islam) dalam materi pendidikan islam agar islam tampil dalam wajahnya yang sesungguhnya yaitu: pluralis, toleran, humanis, transformatif, aktual, dan egalitarian. Seperti dikemukakan oleh Nurcholish Madjid bahwa watak inklusif islam adalah pikiran bahwa yang dikehendaki islam ialah suatu sistem yang menguntungkan semua orang termasuk mereka yang non-Muslim.¹⁷

Sejarah menunjukkan bahwa Muhammad adalah pribadi yang sangat menghargai manusia siapapun dan berasal dari mana mereka. Bahkan Muhammad pun tidak mengurangi rasa hormatnya terhadap orang yang beragama lain. Sehingga Islam ialah agama yang berupaya memberantas habis stratifikasi dalam masyarakat. Hal itu terlihat dari berbagai macam nash baik di dalam al-Qur'an maupun as sunnah yang menegaskan kedudukan manusia adalah sama di hadapan manusia lainnya, selain itu juga islam tidak mengenal kerahiban dan memperbolehkan pengkultusan seseorang secara berlebihan.

Oleh karena itu, paradigma behavioristik mekanistik tersebut perlu digeser pada paradigma humanisme teosentris-konstruktivistik. Dalam bingkai paradigma humanisme teosentris-konstruktivistik, inilah bentuk rekonstruksi terhadap spiritualisasi nilai-nilai inklusivitas di da-

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

lam pendidikan islam.¹⁸ Selama ini proses pendidikan islam cenderung bersifat ideologis-otoriter yang kemudian mengarah kepada hal-hal yang dogmatis-eksklusif. Agar islam memiliki wajah yang humanis, dalam arti di dalamnya ada pengakuan terhadap nilai-nilai dasar manusia seperti hakikat asasi dan martabat manusia, serta kesamaan hak dan kewajiban manusia maka harus ada reaktualisasi nilai-nilai moral universal (inklusif) di dalam studi-studi islam.

Nilai inklusi yang memberikan akses selebar-lebarnya bagi semua kalangan dengan latar belakang yang berbeda untuk dapat berinteraksi tanpa adanya perbedaan. Nilai-nilai madani dalam masyarakat Madinah menjadi referensi penting sekaligus pondasi dalam menciptakan kehidupan yang damai di dalam kemajemukan. Adapaun nilai-nilai madani yang dimaksud ialah menjunjung tinggi pluralisme, persamaan hak dan martabat sebagai manusia, konsep keadilan tanpa memandang latar belakang, status sosial, dan konsep toleransi. Hal itu sesuai dengan pendapat Mulyadhi Kartanegara menguraikan nilai-nilai madani yang menyokong tegaknya masyarakat kosmopolit meliputi: *Inklusioisme*, yaitu keterbukaan diri terhadap “unsur luar” melalui kemampuan melakukan apresiasi dan seleksi secara konstruktif.

1. *Humanisme*, dalam arti cara pandang yang memperlakukan manusia sematamata karena kemanusiaannya, tidak karena sebab lain di luar itu, semisal ras, kasta, kekayaan, dan agama. Termasuk kedalam humanisme di sini adalah sifat egaliter yang memandang manusia sama derajatnya.

2. *Toleransi*, yaitu adanya kelapangdadaan dan kebesaran jiwa dalam menyikapi perbedaan.
3. *Demokrasi* yang memberi ruang bagi kebebasan berpikir dan penyampaian kritik.¹⁹

Sikap tersebutlah yang membekali kesiapan umat Islam mengarungi *global village* dengan segenap peluang dan tantangannya. Menurut Cak Nur, sikap dasar tersebut dipandang sejalan dengan basis teologis bahwa (1) kemajemukan merupakan sunah Tuhan, (2) pengakuan hak eksistensi agama-agama lain, (3) titik temu/kontinuitas agama-agama, dan (4) tidak ada paksaan dalam agama.²⁰ Dasar normatif yang dapat disebutkan untuk menguatkan hal ini, antara lain adalah Q.S. Yunus: 19, Q.S. Al-Baqarah: 62, 112, 213, 256, Q.S. Al-Maidah: 48, Q.S. Al-Nisa: 125, Q.S. Al-Nahl: 36, dan Q.S. Al-Kafirun: 6.²¹ Ini menunjukkan banyak sekali ayat al Qur’an yang menjelaskan tentang inklusi, termasuk di dalamnya ayat-ayat tentang keadilan, persamaan, toleransi, pluralisme dan multikultural.

Ide Kohlberg tentang manusia yang memiliki penghormatan terhadap nilai dasar manusia itu sendiri seperti hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan merupakan nilai-nilai yang juga ada di dalam Al Qur’an. Seperti firman Allah SWT;

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran

18 Edi Susanto, *Spiritualisasi Pendidikan Agama Islam: Menuju Keberagaman Inklusif Pluralistik Pendidikan*, (Tadrís 84 Volume 9 Nomor 1 Juni 2014), hlm. 98.

19 Mulyadhi Kartanegara, *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons terhadap Modernitas*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 80-91.

20 Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, hlm. 177-196.

21 Mahmud Arif, *Pendidikan Agama islam Inklusif-Multikultural*, (*Jurnal Pendidikan Islam* :: Volume I, Nomor 1, Juni 2012/1433), hlm. 6.

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An Nahl: 90).

Ayat di atas secara sederhana perintah Allah SWT kepada manusia untuk senantiasa berbuat adil dan kebajikan (kebaikan) bagi sesama manusia. Nilai lain yang dibutuhkan dalam membentuk moral ialah kejujuran, seperti dalam surat Al Ahzab ayat 70, Allah SWT berfirman; “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.*” (Q.S. Al Ahzab; 70). Nilai-nilai seperti ini sangat penting dalam membangun moral universal yang utuh seperti dalam teori perkembangan Kohlberg. Mungkin dalam tahap awal berlaku adil dan jujur tersebut hanya akan di motivasi untuk menghindari dosa, dan kemudian mendapatkan pahala. Namun dalam tahapan-tahapan selanjutnya, kesadaran akan pentingnya menebar kebaikan, keadilan dan menghormati hak dasar orang lain akan mulai muncul.

Implikasi Nilai Etika-Moral Universal Terhadap Pendidikan Politik (*Political Socialization*)

Globalisasi telah membawa kemakmuran ekonomi dan kemajemukan IPTEK, akan tetapi juga dapat membawa dampak krisis spiritual dan kepribadian manusia sehingga memunculkan kesenjangan dan kekerasan sosial dan tidak adanya demokrasi.²² Termasuk di era reformasi sistem politik yang berbarengan dengan kemajuan teknologi informasi memunculkan banyak permasalahan moral. Untuk itu membangun kembali moralitas

secara kultural dilakukan dalam rangka menyempurnakan peran hukum yang telah membangun moralitas walaupun sifatnya behavioristik.

Dalam islam telah dijelaskan mengenai manajemen konflik yang damai yakni melalui dialog (Q.S. 42: 38), tanpa adanya klaim kebenaran kelompok atau golongannya sendiri (Q.S. 88: 21-26), serta menghindari bentuk-bentuk perilaku diskriminatif (Q.S. 28:4). sehingga suasana politik baik maka diharapkan energi-energi positif akan muncul yang kemudian menumbuhkan budaya kooperatif yakni bekerja sama, saling menghargai dan membantu demi kemajuan bersama.

Secara historis, kemajemukan masyarakat Madinah di zaman Nabi Muhamamd dapat dipersatukan oleh nilai moral universal yang termaktub di dalam piagam Madinah. Yang mana pemersatu mereka ialah kontrak sosial yang mengatur lintas suku, etnis, dan agama. Kemudian tercipta kehidupan madani yang memiliki ciri khasnya yang menjunjung sikap inklusifitas, kasih sayang, humanis, toleransi dan berkeadilan. Selain itu embrio oposisi dan peran penyeimbang negara pada kemunculan partai politik di era khalifah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dengan gagasan suksesi khalifah dan pertanggungjawabannya.²³

Selain itu konsep nilai-nilai kemanusiaan yang juga menjadi mendapat afiliasi dari semua golongan adalah nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia. Lebih jauh lagi semua orang akan mendambakan kehidupan yang damai, tanpa konflik fisik ataupun konflik ideologi antar kelompok. Bahkan tidak ada manusia satu pun yang membenarkan sikap saling menghujat dan memfitnah. Singkatnya nilai-nilai kemanusiaan dan nilai etika

²² Basuki, *Mengkonstruksi Pendidikan Kritis-Humanis Dan Populis (Tinjauan Tentang Politik Pendidikan Indonesia Di Era Globalisasi Informasi)*, (Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Kependidikan Vol 4 No.2 April Juni 2006), hlm. 40.

²³ M. Abdul Fattah Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 33.

inklusi di dalam islam dapat digunakan dalam proses pendidikan moral. Secara umum Nilai-nilai yang dipromisikan dalam pendidikan moral ialah seperti tabel dibawah ini;

Indikator Nilai	Interaksi Pertentangan	Interaksi Promotif
Keberhasilan	Mengalahkan orang lain	Upaya bersama
Orang lain	Saingan, ancaman untuk keberhasilan sendiri	Teman, fasilitator potensial
Upaya sendiri	Menghalangi orang lain, menyebabkan kegagalan mereka	Memfasilitasi, memberi sumbangan pada keberhasilan dan kesejahteraan orang lain
Harga diri	Tergantung pada kemenangan	Pengakuan dasar akan diri dan orang lain Intrinsik
Tugas	Ekstrinsik, alat menang	Intrinsik
Pengembalian perspektif agresif keadilan	Tidak ada, atau sebagai strategi wajar ekuitas	Persamaan hak dan kebutuhan

Tabel Interaksi Nilai Pertentangan dan Promotif

Beberapa cara yang bisa dilakukan dalam sosialisasi politik seperti yang dikemukakan dalam teori perkembangan moral Kohlberg adalah teladan moral. Jika penulis menghubungkan dengan pendidikan politik maka yang menjadi teladan moral dalam hal ini adalah para elite partai dan politisi. Tokoh teladan moral yang dimaksudkan Kohlberg tentu harus sesuai dengan kontribusinya di zamannya masing-masing. Mereka yang memiliki kesempurnaan atau kesucian diri tanpa ada sedikitpun kesalahan. Masyarakat perlu

memahami bahwa seseorang tidak perlu menjadi sempurna sebelum berbuat baik, dan tidak mungkin menyelesaikan satu permasalahan moral secara utuh. Namun setidaknya tindakan untuk meminimalisir permasalahan moral tersebut patut untuk diapresiasi.

Selanjutnya Kohlberg juga memberikan cara selanjutnya dalam merekonstruksi moral politik, ialah dengan mencoba menggiring tahapan kognisi moral ke tahap *post-konvensional* yaitu dengan diskusi moral. Konflik moral yang diangkat sebagai bahan diskusi hendaknya bisa menimbulkan perselisihan pendapat. Tidak semua orang berpikir menurut tahap yang sama. Selama menjelaskan semua argumentasi yang berada satu tahap terendah yang terdapat pada siswa, misalnya guru lebih mendukung tahap dua daripada tahap satu. Apabila argumen dua telah dimengerti siswa, lalu guru menantang ke tahap tiga. Melalui diskusi moral yang berulang-ulang diharapkan mampu mencapai tingkat-tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi.²⁴ Hal itu juga bisa dilakukan pada komunitas-komunitas informal dalam meningkatkan moral anggota komunitas atau kelompoknya dalam membangun tahap demi tahap moralnya.

Jika alasan mereka membuat sesuatu dalam dilema moral karena ketakutan hukum atau menghindari hukuman, maka tahapan moralnya masih dalam tahapan pre-konvensional. Selanjutnya jika alasan-alasan mereka terletak pada tanggung jawab sosial terhadap kelompoknya maka ia berada pada tahapan konvensional atau kebiasaan. Tahapan terakhir yang merupakan inti dari tahapan moral ini adalah tahapan post-konvensional yang mana alasan siswa memutuskan sesuatu adalah karena nilai-nilai universal seperti hak per-

²⁴ Lawrence Kohlberg, *Tahap-tahap Pertimbangan Moral*, (Yogyakarta: Kamisius, 1995), hlm. 74.

samaan, keadilan, kemanusiaan dan semacamnya.

Membangun komunitas adil dapat mulai dari lembaga formal sampai pada tataran ranah informal sosial budaya. Tak hanya itu, membangun komunitas adil juga harus dilakukan antar internal golongan dan kelompok masing-masing. Menurut Lewin (1948) mengatakan bahwa dalam merubah nilai-nilai pribadi seseorang haruslah berfokus pada perubahan nilai-nilai kelompok darimana individu berasal.²⁵

Ini adalah wujud internal masing-masing kelompok dan golongan politik saat ini yang kurang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan seperti saling menghormati dalam beraspirasi, menjalankan demokrasi yang sehat, melibatkan semua pihak dalam bermusyawarah mengambil keputusan dan lainnya. Sehingga pendekatan moral tidak semata-mata *developmental* (perkembangan) tetapi juga sebagai “perkembangan-sosial” (Snarey dan Pavkov 1991).²⁶ Jika secara internal masing-masing kelompok politik sudah membudayakan nilai-nilai etika kearifan dalam berpolitik maka dalam tataran yang lebih besar yakni antar kelompok juga akan terinternalisasi dengan masif.

Penutup

Konsep alternatif dalam merekonstruksi etika politik yang dirumuskan dalam pendidikan moral harus menjadi perhatian penting. Mengingat kondisi dan suasana golongan dan kelompok elite politik banyak mengedepankan cara-cara amoral dalam mencapai tujuannya. Mirisnya tujuan-tujuan itu hanya tertuju pada kepentingan kelompok bukan berasas pada kebaikan bersama bernegara.

Untuk itu diskursus pendidikan moral yang tepat yang nantinya akan berpengaruh pada situasi politik perlu dibangun kembali. Baik melalui budaya baru sekaligus upaya pencegahan dalam institusi-institusi formal seperti sekolah. Seperti membudayakan nilai-nilai moral universal yang telah dirumuskan Kohlberg yang dapat menumbuhkan sikap kolektif, kooperatif, dan demokratis di sekolah-sekolah.

Salah satu sumber nilai moral universal telah mendapat rumusan dalam ajaran islam. Sebagaimana universalitas nilai etika dalam islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta, sehingga bukan hanya eksklusif berbicara golongan atau kelompok. Diantara nilai-nilainya adalah saling menghargai, menghormati, menghindari perpecahan dan bersikap lemah lembut.

Selain itu juga pembudayaan moral universal dapat dilakukan pada kondisi informal, baik di media sosial maupun di sosial kemasyarakatan. Setiap elemen masyarakat bertanggung jawab terhadap kondisi perpolitikan hari ini. Untuk menghindari perpecahan, masyarakat harus memulainya dengan ikut berpartisipasi di dalamnya proses pendidikan moral.

Daftar Pustaka

- Ananda, Suadamara. 2006. Hukum dan Moralitas. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24. No. 3.
- Arif, Mahmud. 2012. Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural, *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 1, No. 1.
- Basuki. 2006. Mengkonstruksi Pendidikan Kritis-Humanis Dan Populis (Tinjauan Tentang Politik Pendidikan Indonesia Di Era Globalisasi Informasi). *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Kependidikan*. Vol 4 No.2.
- Hamdani, Fitrah. 2016. Paradigma Profetik: Antara Konsep Moralitas Piagam Madina Dan Konsep Moralitas Hukum H.L.A Hart. *Jurisprudence*. Vol. 6 No.1.

²⁵ Larry P. Nucci dan Darcia Narvaez, *Op.Cit.*, hlm. 315.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 96.

- Kartanegara, Mulyadhi. 2007. *Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons terhadap Modernitas*. Jakarta: Erlangga.
- Kohlberg, Lawrence. 1995. *Tahap-tahap Pertimbangan Moral*. Yogyakarta: Kamisius.
- Kuswandi, Aos. 2010. Membangun Budaya Gerakan Politik Dalam Sistem Politik Indonesia. *Jurnal governance*. Vol. 1 No. 1.
- Lay, Cornelis. 2000. Antara Anarki dan Demokrasi (Masalah kekerasan Politik di Indonesia). *Jurnal Ilmu sosial dan politik*. Vol. 3 No. 3.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin dan Peradaban*.
- Nucci, Larry P. dan Darcia Narvaez. 2014. *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter*, Terj. Imam Baehaqie dan Derta Sri Widowatie. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Santoso, M. Abdul Fattah. 2015. Kontribusi Etika Islam Pada Pendidikan Politik: Solusi Bagi Problem Civil Society Indonesia di era Reformasi. *Jurnal Pkn Progresif*. Vol. 10 No.1.
- Sarbini. 2011. *Model pembelajaran kognitif moral: dari teori ke aplikasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Simarmata, Salvatore. 2014. Media Baru, Ruang Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik di Indonesia. *Prodi Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya Jakarta*. Vol. 3 No. 2.
- Susanto, Edi. 2014. Spiritualisasi Pendidikan Agama Islam: Menuju Keberagaman Inklusif Pluralistik Pendidikan. *Tadris* 84. Vol. 9 No. 1.

